



# Minta Selasar Malioboro Ditata Ulang

## PKL Tolak Keras Klaim Hak Privat PPMAY

**YOGYA. TRIBUN** - Per-kumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) meminta selasar atau lorong kawasan pertokoan di Jalan Malioboro-Ahmad Yani ditata ulang, khususnya keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan itu. Sementara PKL menyebut pembangunan selasar ditilik dari sejarahnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot).

Koordinator PPMAY, KRT Karyanto Purbokusodo, mengatakan, pihaknya telah melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sejak November 2020 yang lalu. Dirinya mengaku telah menemui pemangku kebijakan Pemkot Yogyakarta, selain itu ia juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Mereka (Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta) mengakui bahwa lorong atau selasar yang ada di sepanjang Jalan Malioboro-Ahmad Yani bukan milik pemerintah, melainkan milik toko," katanya, kepada *Tribun Jogja*, Senin (12/4).

Oleh karena itu, hak untuk pengelolaannya sepenuhnya berada pada pemilik toko yang dalam hal ini para kelompok PPMAY. Pengakuan tersebut, lanjut Karyanto di-buktikan dengan kepemilikan sertifikat sah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai perundang-undangan.

"Ada bukti kepemilikan berupa sertifikat sah dari BPN dan sesuai undang-undang," paparnya.

Selain bukti berupa sertifikat hak milik, berdasarkan pemaparan beberapa saksi, dulunya di sepanjang Jalan Malioboro dan Jalan Ahmad Yani tidak terdapat lorong atau selasar. Barulah sekitar Tahun 1974 Wali Kota Yogyakarta pada saat itu memerintahkan kepada pemilik toko untuk merelakan sebagian tokonya dibongkar untuk dijadikan lorong.

"Tujuan pemerintah dan pemilik toko sama sekali tidak ada niatan untuk dijadikan tempat berjualan. Itu tujuannya supaya pengunjung saat hujan tidak kehujanan, dan tidak kepanasan," ujarnya.

Ia menegaskan, siapa pun selain pemilik toko tidak berhak menyewakan atau mengontrakkan serta memperjual belikan lorong toko tersebut. Lebih lanjut, Karyanto menuturkan, pihaknya akan meminta kepada Pemkot Yogyakarta maupun Pemerintah DIY untuk menata ulang fasad kawasan Malioboro khususnya selasar kawasan tersebut agar lebih aman, nyaman dan bersih.

"Kami akan bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta dan pemerintah DIY untuk menata fasad, supaya lebih kondusif, aman dan nyaman," tegasnya.

Dari keterangannya, ter-

dapat sekitar 200 anggota PPMAY yang menyuarakan agar para PKL yang berada di sekitaran toko para pengusaha itu untuk berbenah dan mencari tempat lain. Dalam waktu dekat, pihaknya akan memasang papan peringatan untuk tidak berjualan di sekitar toko anggota PPMAY yang ditujukan bagi para PKL.

"Sudah kami komunikasi-kan tapi susah diatur. Nanti akan kami pasang papan peringatan," tuturnya.

### Tidak pantas

Menanggapi hal itu, Pengawas dan Penasihat Koperasi Paguyuban Tri Dharma KPL Malioboro Rudiarto menga-takan, dirinya dan 913 peda-gang lainnya yang tergabung di Koperasi Tri Dharma menolok keras apabila pihaknya diklaim telah memanfaatkan lahan para pemilik toko.

Menurut sejarah yang ia ketahui, pembangunan lorong di kawasan Malioboro dilakukan Pemkot Yogyakarta bukan dari lahan pemilik toko. Tapi saat itu toko diminta mundur tiga meter untuk kepentingan publik. Soya kira tidak pantas kalau berpikir untuk hak privat," katanya.

Ia menambahkan, selama ini Malioboro dibangun dengan kebersamaan, sehingga ke depan hanya butuh pengaturan untuk saling menjaga, menghormati satu sama lain. Karena, baik pengusaha maupun PKL di kawasan itu sama-sama sedang mencari nafkah.

### SILANG PENDAPAT

- PPMAY meminta selasar atau lorong kawasan pertokoan di Jalan Malioboro-Ahmad Yani ditata ulang.

- Pengusaha meminta pemerintah menata keberadaan PKL di kawasan itu.

- PKL menyebut pembangunan selasar dilaksan-kan oleh Pemkot.

- Mereka menolak keras jika memanfaatkan lahan pengusaha.

"Kami bisa memahami ke-pentingan pengusaha, tapi pengusaha juga bisa mema-hami kepentingan pedagang kecil," imbuhnya.

Menurutnya, audiensi yang dilakukan kelompok PPMAY kepada pemerintah itu hanya suara sepihak. Karena sepe-ngetahuan dirinya, regulasi yang disusun Pemkot Yog-yakarta ada beberapa ruang yang sudah diatur untuk ke-giatan ekonomi, yakni tempat berjualan PKL, pertokoan, dan ruang publik.

Sementara itu, pihak Pem-kot Yogyakarta hingga Senin (12/4) malan belum member-ikan tanggapan atas usulan ini. Telepon dan pesan singkat Tri-bun Jogja kepada Wakil Wali Kota dan Kepala UPT Pengelolaan Cagar Budaya, belum mendapat respons. (hda)



TRIBUN JOGJA/MG/FAJAR SAFIT

**BERBELANJA** - Sejumlah wisatawan sedang berbelanja di lapak para PKL yang berada di sela-sar atau lorong kawasan pertokoan Jalan Malioboro

| Instansi                                 | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 06 September 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005